

# Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan sebagai Upaya Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Kampung Wisata Kereng Bangkirai

Viona Okvelin Winey\*<sup>1</sup>, Deasy Eka Sintha<sup>2</sup>, Octavia Alva Friskila<sup>3</sup>, Yonatan Ari Santoso<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

## ABSTRACT

Environmental cleanliness plays an important role in supporting sustainable tourism, as it affects destination perception, tourist satisfaction, and environmental sustainability, especially in tourist areas that are directly adjacent to local communities. This study aims to examine the role of the Palangka Raya City Tourism Office in managing environmental cleanliness in the Kereng Bangkirai Tourism Village as part of efforts to realize sustainable tourism. The results of the observation show that cleanliness management differs between the front area and the inner part of the tourist area. It also shows that inter-agency coordination and community participation are not yet optimal. This study conducted descriptive qualitative research using interviews, observation, and documentation. The results show that the tourism sector is responsible for acting as a regulator, dynamizer, facilitator, and motivator in environmental cleanliness management. However, its implementation has not been fully optimal due to low collective awareness in some communities, inconsistent participation of the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), and a lack of cross-sector coordination. Supporting factors include policy support and the availability of sanitation facilities, while inhibiting factors include limited resources and a lack of coordination among stakeholders.

## ABSTRAK

Kebersihan lingkungan memegang peran penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan, karena memengaruhi persepsi destinasi, kepuasan wisatawan, dan keberlanjutan lingkungan, terutama di daerah wisata yang berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di Kampung Wisata Kereng Bangkirai sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan berbeda antara area depan dan bagian dalam kawasan wisata. Ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat belum optimal. Penelitian ini melakukan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata bertanggung jawab untuk berperan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan motivator dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena kesadaran kolektif yang rendah di beberapa komunitas, partisipasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang belum konsisten, dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Di antara faktor yang mendukung adalah dukungan kebijakan dan ketersediaan sarana kebersihan, sedangkan faktor yang menghambat adalah keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

## CONTACT

[okvelinwiney@gmail.com](mailto:okvelinwiney@gmail.com)

## KEYWORDS

Environmental Cleanliness, Kereng Bangkirai, Sustainable Tourism, Role of The Tourism Office, Tourism Village

Received: 10/03/2026

Revised: 28/03/2026

Accepted: 29/04/2026

Online: 30/04/2026

Published: 30/04/2026

Al-ijtima'i is licenced under a [Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence \(CC-BY-SA\)](#)

## INTRODUCTION

Kebersihan lingkungan menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan kualitas sebuah tempat wisata, sekaligus mencerminkan seberapa baik pengelolaan pariwisata di suatu daerah. Pengelolaan kebersihan yang tidak baik tidak hanya membuat pengunjung kecewa, tetapi juga berpotensi merusak daya tarik tempat wisata secara berkelanjutan dalam waktu yang lama (Sana, 2025). Di dalam pariwisata berkelanjutan, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai pengatur dan penyelenggara yang bertugas memastikan lingkungan di kawasan wisata tetap terjaga dengan baik. Peran ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari komunitas setempat dan para pihak terkait, karena kelangsungan hidup destinasi wisata sangat bergantung pada tingkat kerja sama dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak (Musleh, 2023).

Kampung Wisata Kereng Bangkirai, yang terletak di Taman Nasional Sebangau Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah merupakan tempat wisata ekowisata yang berbasis ekosistem rawa gambut dan memiliki keunikan berupa wisata air hitam yang memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi. Secara area, terdapat perbedaan kondisi yang cukup jelas. Area di dekat pintu masuk, yang merupakan ikon sekaligus titik pertama yang dilihat pengunjung permukiman dan berbatasan langsung dengan permukiman warga terlihat kurang rapi dan kumuh, sedangkan area di dalam kawasan wisata setelah melewati loket tiket dinilai lebih bersih oleh para pengunjung. Perbedaan kondisi di antara dua area ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan secara teknis, tetapi juga mencerminkan isu yang lebih serius, yaitu ketidakjelasan dalam menentukan batas wewenang dan bagaimana tugas-tugas pengelolaan lingkungan di kawasan wisata dibagi antar pihak (Sabaruddin et al., 2024).

Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya, bersama Dinas Perhubungan dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), adalah pihak utama yang secara resmi bertugas mengkoordinasikan dan pembinaan pengembangan di Kampung Wisata Kereng Bangkirai. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi dinamika berupa perbedaan pendapat dan ketegangan antara pihak dinas dan Pokdarwis, terutama selama masa transisi kepemimpinan karena masih menunggu penetapan ketua yang baru.

Kondisi tersebut memengaruhi kurangnya optimalnya kerjasama dan pembagian tugas dalam mengelola kebersihan antara area permukiman dan area wisata. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi dalam kepemimpinan dan kejelasan struktur organisasi juga berdampak pada keberhasilan pengelolaan wilayah wisata. Terkait dengan batasan tanggung jawab dalam hal kebersihan antara area permukiman dan area wisata, serta ketergantungan masyarakat yang terlalu besar terhadap pemerintah dalam urusan membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan, konflik, dan perbedaan dalam penyelenggaraan peran kelembagaan (Rakhmi et al., 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya sudah membahas tentang pengelolaan pariwisata dan peran lembaga kelembagaan, tetapi masih ada hal-hal yang belum tercakup dan perlu diteliti lebih lanjut oleh penelitian ini. Dalam (Harsiana et al., 2021) ditemukan bahwa kemampuan Dinas Pariwisata dalam mengelola destinasi wisata masih terbatas karena kurangnya kerja sama antar bidang serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki, meskipun penelitiannya tidak secara jelas menggunakan teori Peran sebagai kerangka acuan. Adapun dalam (Setiawan, 2022) menunjukkan bahwa efektivitas kegiatan Pokdarwis sangat tergantung pada bantuan dari instansi terkait, termasuk dalam penyediaan fasilitas kebersihan, meskipun keduanya tidak menganalisis secara mendalam dinamika hambatan dalam peran kelembagaan. Penelitian tentang pengelolaan sampah di jalur pendakian Sembalun menunjukkan bahwa beberapa program kebersihan belum bisa menyelesaikan masalah sampah dengan baik, meskipun menjaga kebersihan adalah bagian penting dari pariwisata yang berkelanjutan.

Namun, penelitian yang telah disebutkan diatas hanya menyoroti peran pengelola taman nasional dan belum menganalisis peran Dinas Pariwisata dari sudut pandang Teori Peran (Ramadhani et al., 2025). Dari hasil peninjauan tersebut, terlihat ada celah dalam penelitian yaitu belum adanya penelitian yang secara khusus menggunakan Teori Peran untuk menganalisis hambatan dalam pengelolaan kebersihan destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata, terutama di area ekowisata berbasis gambut di Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menggunakan Teori Peran (Role Theory) sebagai dasar utama untuk menganalisis. Teori ini menyatakan bahwa setiap lembaga memiliki posisi tertentu dalam masyarakat dan diharapkan melakukan tugas sesuai dengan peran yang sesuai dengan posisinya (Fiani & Marzaniar, 2025; Nurjaman et al., 2025). Hambatan dalam pelaksanaan Teori Peran memunculkan fenomena ketegangan peran (Role Strain), Konflik Peran (Role Conflict), dan Kesenjangan Harapan Peran (Role Expectation Gap) yang memengaruhi efektivitas kinerja lembaga (Sutanto & Subagyo, 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal, yaitu penelitian ini menggunakan semua aspek dalam Teori Peran secara menyeluruh untuk menganalisis cara mengelola kebersihan destinasi wisata. Kemudian penelitian ini melihat perbedaan kondisi kebersihan antara area yang berdekatan langsung dengan permukiman warga dan area utama wisata setelah gerbang masuk, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam pengelolaan di dalam satu wilayah yang sama. Selanjutnya penelitian ini membuat peta yang terstruktur mengenai hambatan yang terkait dengan lembaga-

lembaga, sehingga bisa digunakan sebagai acuan atau contoh dalam mengevaluasi dinas pariwisata di daerah lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di Kampung Wisata Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya? dan (2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan kebersihan lingkungan di kawasan Kampung Wisata Kereng Bangkirai?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dan mencari faktor-faktor yang pendukung serta penghambat dalam pengelolaan kebersihan di Kampung Wisata Kereng Bangkirai. Analisis ini dilakukan dengan menerapkan Teori Peran, sehingga bisa menghasilkan rekomendasi yang jelas dan dapat diterapkan untuk memperkuat kelembagaan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan di Kota Palangka Raya.

## **METHODS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam cara pengelolaan kebersihan di area Kereng Bangkirai. Data dikumpulkan dengan cara wawancara semi-terstruktur (Ahyar et al., 2020; Haris Herdiansyah, 2015), observasi (Fiani & Marzaniar, 2024; Haris Herdiansyah, 2015), dan peneliti juga melakukan dokumentasi (Haris Herdiansyah, 2015) terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan sebagai bahan data tambahan untuk memperkuat temuan penelitian.

Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan narasumber menjelaskan pengalaman, strategi, serta hambatan yang mereka hadapi secara lebih terbuka dan sesuai dengan situasi di lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di unit Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya, perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang bertugas di area wisata, serta pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan kebersihan di tempat wisata tersebut.

Observasi di lapangan dilakukan agar bisa melihat langsung kondisi kebersihan di area depan dan bagian dalam kawasan wisata, sehingga informasi dari wawancara dapat didukung dengan bukti-bukti nyata yang sesuai dengan situasi di lapangan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan panduan kerja, kebijakan mengenai kebersihan, serta catatan kegiatan yang terkait sebagai acuan dalam membandingkan hasil wawancara dan pengamatan. Dengan demikian, melalui metode wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai sistem pengelolaan kebersihan di kawasan wisata

Kereng Bangkirai serta dinamika kerja sama antar pihak yang terlibat dalam mendukung pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan.

## RESULTS

Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya secara formal telah menjalankan keempat fungsi pokok peran pemerintah dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di Kampung Wisata Kereng Bangkirai, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan motivator (Mutmainnah, 2023). Namun, tingkat pelaksanaan masing-masing fungsi berbeda-beda dan beberapa di antaranya belum berjalan secara optimal.

Sebagai regulator, dinas telah menyusun aturan, membagi tanggung jawab, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan wisata, termasuk menetapkan standar kebersihan, mengatur penempatan tempat sampah, dan menetapkan batas kewenangan antara kawasan wisata dan area permukiman. Meski demikian, pelaksanaan fungsi ini belum sepenuhnya optimal, tercermin dari masih adanya kesenjangan kondisi kebersihan antara area depan yang berdekatan dengan permukiman warga dan area utama wisata setelah pintu masuk. Regulasi dan pembagian kewenangan yang ada belum dipahami atau dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak, sementara koordinasi antar instansi masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan kebersihan dapat berjalan lebih efektif (Rustiana et al., 2024).

Sebagai fasilitator, dinas menyediakan sarana dan prasarana kebersihan berupa tempat sampah di beberapa titik kawasan, memberikan pembinaan kepada pengelola wisata, serta mendorong partisipasi Pokdarwis dan masyarakat. Namun fungsi ini menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya dan belum konsistennya keterlibatan Pokdarwis maupun warga sekitar.

Kegiatan kebersihan masih sangat bergantung pada inisiatif pemerintah daerah, sementara kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan wisata belum merata. Suprpto et al. (2023) menegaskan bahwa penyediaan fasilitas kebersihan merupakan fondasi dasar pengelolaan destinasi yang berkaitan langsung dengan kenyamanan pengunjung, sehingga keterbatasan ini berdampak nyata terhadap kualitas kawasan secara keseluruhan.

Sebagai dinamisator, dinas aktif menjalin sinergi lintas sektor dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya untuk memastikan pengelolaan destinasi berjalan secara terintegrasi. Wujud konkret fungsi ini antara lain pelaksanaan Gerakan Aksi Sapta Pesona bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng serta masyarakat lokal (Trisnawati, 2022), yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kebersihan, keindahan, dan keramahan sebagai daya tarik wisata. Walaupun kolaborasi ini masih

menghadapi tantangan karena keterlibatan masyarakat berbasis inisiatif lokal belum sepenuhnya terbentuk secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai motivator, dinas mendorong partisipasi masyarakat melalui penguatan nilai-nilai Sapta Pesona, pemberdayaan Pokdarwis, dan penyelenggaraan kegiatan bersama. Gerakan Aksi Sapta Pesona pada Oktober 2022 yang melibatkan 250 orang dari berbagai komponen masyarakat menjadi salah satu contoh nyata dari fungsi ini (Trisnawati, 2022). Selain itu, inisiatif sosialisasi pengolahan sampah plastik menjadi ecobrick di Dermaga Kereng Bangkirai juga dilaksanakan bersama warga lokal dan akademisi (Sari et al., 2024). Namun, program sosialisasi yang ada belum diperbarui secara rutin sehingga pengaruhnya terhadap perubahan perilaku masyarakat masih terbatas. Sebagian warga masih cenderung bergantung sepenuhnya pada dinas dalam hal kebersihan lingkungan, sehingga diperlukan perluasan upaya motivasi melalui media sosial dan penyelenggaraan event wisata yang lebih atraktif.

Pelaksanaan keempat fungsi peran tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Di sisi pendukung, terdapat struktur pengelolaan yang telah terbentuk dengan karyawan yang secara khusus dialokasikan untuk urusan kebersihan, fasilitas fisik berupa tempat sampah dan peralatan kerja yang disediakan dinas (Galante & Pramitasari, 2023), kerja sama resmi antar sektor yang telah terjalin sejak 2018, serta potensi alam dan budaya lokal yang kuat sebagai modal dasar pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas (Ijilen et al., 2023).

Di sisi penghambat, terdapat lima faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, keterlambatan pembayaran gaji petugas kebersihan selama lebih dari dua bulan akibat perubahan sistem penggajian, yang berdampak langsung pada motivasi kerja dan intensitas kegiatan kebersihan. Kedua, konflik kelembagaan antara dinas dan Pokdarwis yang diperparah oleh masa transisi kepemimpinan, sehingga menghambat komunikasi dan koordinasi yang efektif. Ketiga, rendahnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat yang masih bergantung sepenuhnya pada dinas, padahal kebersihan permukiman yang menyatu dengan kawasan wisata turut memengaruhi persepsi pengunjung.

Keempat, pencemaran perairan dari limbah perkotaan yang bersumber dari luar kawasan wisata dan memerlukan koordinasi lintas wilayah serta lintas sektor untuk penanganannya (Sadilla et al., 2025). Kelima, lemahnya koordinasi lintas instansi yang menyebabkan penyelesaian masalah sektoral seperti pencemaran sungai dan tata kelola kawasan menjadi terhambat.

## DISCUSSIONS

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya telah menjalankan keempat fungsi peran pemerintah regulator, fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di Kampung Wisata Kereng Bangkirai, meskipun dengan tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Dengan mengacu pada teori peran pemerintah (Mutmainnah, 2023) dan fenomena disfungsi peran (Subagyo et al., 2025), diskusi ini menelaah apa yang telah berhasil dilaksanakan sekaligus mengapa efektivitas penuh masih belum tercapai.

Di antara keempat fungsi tersebut, fungsi fasilitator terbukti paling konsisten berjalan, yang ditunjukkan oleh tersedianya infrastruktur kebersihan fisik dan sistem pengangkutan sampah harian meskipun beroperasi dalam kondisi terbatas. Hal ini sejalan dengan (Suprpto et al., 2023) yang menyatakan bahwa penyediaan fasilitas kebersihan merupakan fondasi dasar pengelolaan destinasi yang berkaitan langsung dengan kenyamanan pengunjung. Sebaliknya, fungsi regulator hanya berjalan secara parsial.

Keberadaan Kepala Bagian Kebersihan memang menandakan adanya mekanisme pengawasan institusional, namun efektivitasnya terganggu oleh kelemahan administratif internal kondisi yang sesuai dengan temuan (Rustiana et al., 2024) yang mengidentifikasi lemahnya regulasi dan koordinasi antar instansi sebagai hambatan struktural utama dalam pengelolaan kebersihan kawasan wisata. Adapun fungsi dinamisator dan motivator menjadi dimensi yang paling lemah dalam implementasi.

Tidak adanya program sosialisasi yang berkelanjutan serta terhambatnya koordinasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) mengindikasikan bahwa dinas belum optimal dalam menggerakkan ekosistem sosial pendukung destinasi. Penelitian (Aspri et al., 2024) menemukan bahwa edukasi lingkungan yang konsisten dan keterlibatan komunitas lokal terbukti meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan kawasan wisata, sehingga mengabaikan kedua fungsi ini membawa dampak yang signifikan.

Untuk menjelaskan mengapa peran-peran tersebut belum berjalan secara optimal, penelitian ini menerapkan tiga fenomena disfungsi peran yang diidentifikasi oleh (Subagyo et al., 2025), yaitu Ketegangan Peran, Konflik Peran, dan Kesenjangan Harapan Peran ketiganya ditemukan terjadi secara bersamaan dan saling memperkuat satu sama lain di Kereng Bangkirai. Ketegangan Peran muncul karena Dinas Pariwisata dituntut untuk memenuhi empat tuntutan peran secara simultan mulai dari penegakan regulasi hingga motivasi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang serius.

Manifestasi paling nyata dari tekanan ini adalah keterlambatan pembayaran gaji petugas kebersihan selama dua bulan, yang memicu penurunan berantai, berkurangnya intensitas kerja lapangan, menurunnya kebersihan kawasan, berkurangnya kenyamanan pengunjung, menurunnya jumlah kunjungan wisata, hingga pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan pelaku usaha lokal.

Konflik Peran muncul dari gesekan antara Dinas Pariwisata dan Pokdarwis yang berakar pada perbedaan pandangan dalam tata kelola kawasan, yang diperparah oleh masa transisi kepemimpinan dalam kelompok masyarakat tersebut. Ketegangan institusional ini menciptakan hambatan komunikasi yang serius dan mengganggu upaya pengelolaan secara terkoordinasi. Kesenjangan Harapan Peran beroperasi secara dua arah, masyarakat mengharapkan dinas menangani seluruh persoalan kebersihan termasuk di lingkungan permukiman warga sementara dinas mengharapkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari ekosistem wisata. Tanpa jembatan komunikasi yang efektif, ketidakselarasan yang saling timbal balik ini akan terus melanggengkan ketidakefektifan tata kelola. Temuan ini selaras dengan (Dedi Suselo et al., 2025) yang mengidentifikasi ketergantungan masyarakat terhadap pengelola eksternal sebagai hambatan utama dalam menjaga kebersihan kawasan wisata pesisir.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa tantangan tata kelola di Kereng Bangkirai bukan disebabkan oleh satu kegagalan tunggal, melainkan oleh konvergensi antara keterbatasan sumber daya, gesekan antar institusi, dan ketidakselarasan harapan. Mengatasi disfungsi yang saling terkait ini tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran yang lebih memadai, tetapi juga mekanisme dialog yang terstruktur antara Dinas Pariwisata, Pokdarwis, dan masyarakat sekitar sehingga membentuk fondasi kolaboratif yang diperlukan bagi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

## CONCLUSIONS

Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya telah menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di Kampung Wisata Kereng Bangkirai, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif akibat tiga permasalahan yang terjadi secara bersamaan, yaitu Ketegangan Peran karena keterbatasan anggaran, Konflik Peran dengan Pokdarwis yang belum terselesaikan, serta Kesenjangan Harapan Peran antara dinas dan masyarakat. Kondisi ini tercermin dari kontras yang mencolok antara bagian dalam kawasan wisata yang relatif tertata dengan area pintu masuk yang masih tampak kumuh dan terabaikan, serta diperparah oleh pencemaran air akibat limbah perkotaan yang memasuki kawasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mencakup perhatian serius terhadap area pintu

masuk sebagai kesan pertama pengunjung, penanganan pencemaran air secara lintas instansi mengingat permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, serta pelaksanaan program penguatan masyarakat secara berkelanjutan guna meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan warga terhadap kawasan wisata. Dengan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, Pokdarwis, dan masyarakat, pengelolaan kebersihan Kampung Wisata Kereng Bangkirai dapat diarahkan menuju pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

## REFERENCES

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. Si., Nur Hikmatul Auliya, Grad. Cert. B., Helmina Andriani, M. Si., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Number March).
- Agustin, R., Siddha, A., & Septiansyah, B. (2024). *PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DESA WISATA ALAMENDAH KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG*. 01(01). <https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2627>
- Alam, H. S., Adi, A. A. G., Putra, M., Krisna, G., Dharma, C., Satya, P., & Diego, B. (2025). *PENATAAN FASILITAS KEBERSIHAN SEBAGAI UPAYA*. 5(2), 427–433.
- Aspri, R. M., Mandala, H., & Bratayasa, I. W. (2024). *PERAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM MENJAGA KEBERSIHAN DI KAWASAN WISATA GILI TRAWANGAN*. 4(2), 527–534.
- Dedi Suselo, Triadi Prisma, Vanneza Dhea Ananda, & Afifaturrofi'ah. (2025). Penguatan Literasi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Ekosistem Pesisir Pantai Dlodod. *Khidmah Nusantara*, 2(1). <https://doi.org/10.69533/z4mj2027>
- Fiani, E., & Marzaniar, P. (2024). ANALYSIS OF CIRCULAR ECONOMY APPROACH OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN ACEH TENGAH. *SANGER: Journal Social, Administration and Government Review*, 2(1), 1–9.
- Fiani, E., & Marzaniar, P. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh. *AL-IJTIMA'I: International Journal of Government and Social Science*, 10(2), 9–18.
- Galante, A., & Pramitasari, D. (2023). *STRATEGI MENGELOLA SAMPAH UNTUK MENDUKUNG KEGLATAN PARIWISATA DI DESA SEMBALUN*. 24(3), 22–36.

- Haris Herdiansyah. (2015). *Wawancara , Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Panggilan Data Khas Kualitatif*. RajaGrafindo Persada.
- Harsiana, F., Sukma, I. N., & Nugroho, S. (2021). *Analisis Kinerja Dinas Parwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pengelolaan Gua Batu Cermin*. 9(1), 123–127.
- Musleh, M. (2023). *Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang : Perspektif Community Based Tourism*. 3, 42–50.
- Mutmainnah. (2023). *Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. 2(1), 34–43.
- Philipus, V., Sawu, B., Pramudiana, I. D., & Roekminiati, S. (2023). *Peran Dinas Pariwisata dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Kampung Adat Gurusina di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*. 2019, 295–308.
- Rakhmi, A., Hamdani, T., Octavanny, V., & Aruman, A. E. (2023). *Komunikasi Pokdarwis dalam Pengimplementasian Program Pengembangan Pariwisata pada Masyarakat Cirendeu Cimahi Jawa Barat Pokdarwis Communications In Program Implementation Of Tourism Development In The Cirendeu Community Cimahi West Java*. 21(02), 93–107.
- Ramadhani, S. N., Susanty, S., & Athar, L. M. I. (2025). *PENGELOLAAN SAMPAH DI JALUR WISATA PENDAKIAN SEMBALUN OLEH BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI UNTUK MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI GUNUNG RINJANI Oleh*. 4(3), 719–724.
- Rustiana, E., Pundenswari, P., Oktavia, R. N., & Agustina, N. (2024). *Strategi pengelolaan sampah di kawasan wisata situ bagendit kabupaten garut*. 15(01), 14–30.
- Sabaruddin, A., Adnan, R., Sembilanbelas, U., Kolaka, N., & Wisata, O. (2024). *Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Tanjung Malaha di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara*. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 7083, 48–61. <https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.353>
- Sadilla, F., Kamal, E., Razak, A., & Prarikeslan, W. (2025). *Analisis dampak sampah domestik terhadap lingkungan perairan pesisir dan kesehatan*. 20(1), 80–90.
- Sana, I. N. L. (2025). *Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan di Destinasi Wisata Alam Indonesia*. 3(1), 24–36.
- Sari, M., Putri, A. F., Putri, A., Rezki, A., Tri, M., Wisne, N., & Fauzi, A. (2024). *SOSIALISASI PEMANFAATAN LIMBAH SAMPAH PLASTIK MENJADI ECOBRICK DI KAWASAN WISATA AIR HITAM , DERMAGA KERENG BANGKIRAI , KOTA*

*PALANGKA RAYA*. 5(3), 4818–4822.

Setiawan, A. (2022). *Peran POKDARWIS dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Biru Kersik Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. 10(3), 263–272.

Suprpto, I. N. A., Pantyasa, W., & Sutiarmo, M. A. (2023). *Peningkatan Peran Pokdarwis Dalam Pengelolaan Desa Wisata Di Desa Pupuan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar*. 03(April), 1–7. <https://doi.org/10.55266/pkmmradisi.v3i1.251>

Sutanto, H. A., & Subagyo, A. (2025). *PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ( PUPR ) DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG BERBASIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI*. 2(1), 344–357.

Tjilen, A. P., Fabian, R., Waas, Y., & Ririhena, S. W. (2023). *Optimalisasi Potensi Desa Wisata Melalui Manajemen Pengelolaan Yang Berkelanjutan : Kontribusi Bagi Kesejahteraan Masyarakat Lokal*. 2(6), 38–49.

Trisnawati, S. (2022). *Sapta Pesona untuk Jaga dan Lestarian Tempat Wisata*. Radio Republik Indonesia. <https://gayahidup.rrt.co.id/palangkaraya/wisata/73980/sapta-pesona-untuk-jaga-dan-lestarian-tempat-wisata>

Wispondono, R. M., Imamah, N., & Yulistiyono, H. (2022). *Penguatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Berbasis Pemecahan Masalah*. Deepublish.

Wulandari, M., Kurniati, E., Samudra, A., Ngazizah, F. N., Hasanah, R., & Tuju, F. (2025). *Pengelolaan Sampah Organik di Desa Wisata Air Hitam sebagai Upaya Implementasi Green Economy , Kelurahan Kereng Bangkirai*. 10(1), 231–237.